



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) TAHUN 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Jln. Mawar No. 10 - Lubuk Pakam



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 ini diriviu dari data program dan kegiatan dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Kemudian data dianalisa kembali serta diselaraskan dengan perkembangan atau isu aktual baik bersifat nasional maupun daerah yang disesuaikan dengan hasil Musrenbang, kemudian dipilih dan ditetapkan berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan sehingga dapat menjadi masukan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 ini masih terdapat kekurangan, namun besar harapan kami agar rancangan Rencana Kerja ini dapat memberikan dayaguna untuk peningkatan kinerja organisasi serta dapat dialokasikan dalam RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021.

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lubuk Pakam, April 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Drs. H. CITRA EFFENDI CAPAH, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710626 199101 1 002**



DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
I.1	Latar Belakang	1
I.2	Landasan Hukum	2
I.3	Maksud dan Tujuan	2
I.4	Sistematika Penulisan	2
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	4
II.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	6
III.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	6
III.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Terhadap Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	7
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	8
IV.1	Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan	8
IV.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	8
BAB V	PENUTUP	13



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan atau *action* masa depan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang tersedia. Pembangunan Daerah adalah manfaat dari sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan bekerja, tersedianya lapangan berusaha dan akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap Perangkat Daerah menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2021.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 ini disusun dengan mempedomani visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang periode 2019-2024 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Renja ini juga disesuaikan dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penyusunannya, rencana kerja ini kemudian dianalisis kembali serta diselaraskan dengan perkembangan atau isu aktual baik bersifat nasional maupun daerah yang disesuaikan dengan hasil musrenbang dan kemudian dipilih dan ditetapkan berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga akan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021.



I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 - 2025;

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan rancangan program dan kegiatan serta pendanaannya untuk dijadikan sebagai bahan masukan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021, dan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang sebagai dasar merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021.



BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan secara singkat kajian (rivi) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, yang digambarkan dalam tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran perangkat daerah terhadap isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, serta uraian rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah yang digambarkan dalam tabel rumusan rencana program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan saran-saran yang diperlukan demi perbaikan kinerja pada masa mendatang.

**BAB II****HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU****II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Pada Renja Tahun 2020 yang lalu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2020 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi terdiri dari 9 (sembilan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN
1	2
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa surat menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10	Penyediaan Makanan dan Minuman
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam / Luar Daerah
12	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2	Pengadaan Mebeleur
3	Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor
4	Pemeliharaan rutin / berkala Kenderaan Dinas / Operasional
5	Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
V	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
2	Sosialisasi / Pembinaan Tentang Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan



1	2
VI	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
2	Fasilitasi / Pendampingan Desa dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan secara Partisipatif
3	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
VII	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
2	Pemilihan Kepala Desa
3	Pembekalan Tugas dan Fungsi Kepala Desa terpilih
4	Bimbingan Teknis Administrasi Desa
VIII	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
1	Pembinaan dan Pelatihan PT. P2W-KSS (lokasi baru) dan pembinaan desa Program Lanjutan
2	Pembinaan dan Penilaian Desa Percontohan Sepuluh Program Pokok PKK Kategori Pelaksana Tertib Administrasi PKK
3	Pembinaan dan Penyusunan Data Posyandu
4	Biaya Operasional Tim Penggerak PKK Kabupaten
IX	Program Pemasayarakatan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaan
1	Pembinaan Pendayagunaan / Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa secara umum realisasi kinerja hasil program dan kegiatan tahun 2020 mencapai kategori **Baik** dengan realisasi 80,6 % dari target capaian sebesar 100%.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pencapaian target kinerja masih dibawah 100% dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah meliputi :

- Belum terbentuknya BUMDes secara menyeluruh di setiap desa.
- Masih rendahnya partisipasi/swadaya masyarakat untuk bergotong royong membangun desa.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Masih kurang memadainya SDM aparatur pemerintahan desa dalam mengelola buku administrasi desa menyusun perencanaan seperti RPJMDes, RKPDes dan pembuatan Perdes serta tidak tersedianya papan data dan dokumentasi kegiatan.
- Masih rendahnya pemahaman perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa.
- Pengelolaan keuangan desa belum berjalan sesuai jadwal dan tahapan masih banyak desa yang terlambat dalam pertanggungjawaban APBDes.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mewujudkan pembangunan dari desa merupakan sebuah visi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Program Dana Desa. Program yang bergulir sejak 2015 ini telah mendorong pembangunan yang masif di desa. Sebuah langkah yang patut diapresiasi dan tentunya dilaksanakan dengan konsep strategis untuk mencapai hasil yang optimal. Sejak Januari 2018, pemerintah menetapkan pola baru dalam pemanfaatan dana desa se-Indonesia, difokuskan kepada padat karya tunai yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat di desa.

Pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional yang telah dirancang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai tahun 2015. Membangun desa sejalan dengan upaya pemerintah sebagaimana yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sekaligus merupakan implementasi program Nawa Cita.

Pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sangat terkait dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah. Membangun desa dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan, pembangunan masyarakat desa serta tata kelola pemerintahan desa dalam pelayanan publik (*good governance*). Pembangunan desa ditujukan untuk mendukung pelaksanaan UU Desa dan mengawal pencapaian target-target RPJM 2015-2019. Selain itu juga untuk menyelaraskan dan memadukan program-program pembangunan desa yang ada di kementerian-kementerian.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat tentu harus ditunjang dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik, tidak dapat ditawar lagi dan harus mutlak terpenuhi. Good governance secara umum dimaknai sebagai konsensus yang dicapai pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Mainstream wacana good governance selama ini menekankan pada tiga poros utama yaitu negara, masyarakat sipil, dan pasar.

Maka, pemetaan governance di desa terdiri dari empat elemen utama yaitu negara (pemerintah desa), masyarakat politik (Badan Perwakilan Desa), masyarakat sipil (institusi dan organisasi sosial), dan masyarakat ekonomi (organisasi masyarakat ekonomi, arena produksi dan distribusi yang dilakukan pelaku dan organisasi ekonomi desa). Dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan penerapan prinsip-prinsip good governance, maka upaya kemandirian desa dapat tercapai.



Berdasarkan perkembangan kebijakan nasional tersebut, maka dilakukanlah identifikasi terhadap isu-isu strategis yang menyangkut tiga hal pokok yaitu Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pengembangan Partisipasi Masyarakat serta Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan Desa menuju perwujudan desa mandiri dan berdaya saing.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Terhadap Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan berdasarkan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.
2. Meningkatkan kapasitas dan peranan lembaga desa dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan keluarga sehat sejahtera.
3. Mengembangkan perekonomian desa yang berdaya saing guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang ke depan adalah :

1. Bertambahnya jumlah Desa Mandiri.
2. Berkurangnya Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan antara lain meliputi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka memandirikan dan mensejahterakan masyarakat, identifikasi terhadap permasalahan pemberdayaan masyarakat pedesaan, aspirasi masyarakat di pedesaan serta pemerintahan desa, dan perkembangan isu-isu strategis dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Isu-isu strategis terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang berkembang tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan dengan memilih, merumuskan serta menetapkan Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan.

IV.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) program dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, dengan rencana pendanaan sebesar Rp. 16.310.296.285,- (*Enam belas milyar tiga ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*). Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Indikator (Output/Outcome)	Target dan Pagu Anggaran Tahun 2021		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keterangan
I PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA							
1	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	1 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Sibolangit, Percut Sei Tuan, Pantai Labu, STM Hulu	Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pembangunan kawasan perdesaan	19 Desa	30.005.548	19 Desa 29.028.196
II PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyeleenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Fasilitasi Penyeleenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	22 Kecamatan	Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyeleenggaraan administrasi pemerintahan	380 Desa	6.164.443.247 380 Desa 8.601.890.668
	2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	22 Kecamatan	Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa	380 Desa	206.398.929	380 Desa 105.829.928
	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	22 Kecamatan	Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa	380 Desa	416.519.832	380 Desa 404.698.880
	4 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	22 Kecamatan	Pengurus BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang dibina dan diberdayakan	265 BUMDesa	253.777.445	255 BUMDesa 263.777.445
	5 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desas serta Lomba Desa dan Kelurahan	22 Kecamatan, Provinsi SU	Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelesaian data evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	380 Desa	592.354.845	380 Desa 367.572.845
III PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Indikator (Output/Outcome)	Target dan Pagu Anggaran Tahun 2021			
					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan				
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	22 Kecamatan	Pengurus dan kader PKK Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penataan dan pembinaan administrasi 10 Program Pokok PKK	380 Desa	186.228.422	380 Desa	232.169.110
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	22 Kecamatan	Pengurus Posyandu	Jumlah Desa yang dibina dalam tata kelola administrasi Posyandu	380 Desa	75.318.554	380 Desa	70.558.252
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kec. Kutalimbaru (Desa Sei Mercirin dan Namorube Julu) Kec. Sibolangit (Desa Bukun dan Desa Durin Serugun)	Kelompok Perempuan di lokasi Desa PT.P2W-KSS	Jumlah kelompok perempuan yang dibina dan difasilitasi dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga	4 Kelompok	177.345.359	4 Kelompok	194.915.359
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	22 Kecamatan	Pemerintah Desa dan lembaga Posyantek	Jumlah Desa yang dibina dan difasilitasi dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan	380 Desa	170.267.880	380 Desa	35.755.399
5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	22 Kecamatan, Provinsi SU dan Nasional	Pengurus dan Kader TP. PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Penyediaan operasional dan kegiatan bagi TP. PKK Kabupaten untuk memberhasilkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	1 Tahun	875.696.928	1 Tahun	838.197.454
IV PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Dinas PMD	ASN Dinas PMD	Jumlah dokumen perencanaan (Renja/RKA/dan lain sebagainya) yang tersusun	7 Dok	86.752.654	7 Dok	84.381.998

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Indikator (Output/Outcome)	Target dan Pagu Anggaran Tahun 2021			
					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
					Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen evaluasi kinerja (LKIP/Evaluasi Renja/dan lain sebagainya) yang tersusun	5 Dok	60.613.300	5 Dok	59.653.300
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas PMD	ASN Dinas PMD	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	4.649.634.957	1 Tahun	4.719.989.707
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Dinas PMD	ASN Dinas PMD	Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan	1 Tahun	286.573.482	1 Tahun	286.053.382
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kantor Dinas PMD	ASN Dinas PMD	Jumlah pengadaan pakaian batik khas daerah	36 Stel	7.401.600	36 Stel	7.401.600
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Dinas PMD	ASN Dinas PMD	Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai (PDH)	36 Stel	23.400.000	36 Stel	23.400.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Dinas PMD	-	Jumlah komponen alat-alat listrik dan penerangan Kantor	7 Jenis	21.435.363	8 Jenis	58.435.363
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas PMD	-	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	20 Unit/Set	276.651.992	30 Unit/Set	299.720.045
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Dinas PMD	-	Jumlah ATK	37 Jenis	24.199.734	37 Jenis	17.119.190
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Dinas PMD	-	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	28.996.397	5 Jenis	20.335.697
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kantor Dinas PMD	-	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1.704 Eks	7.993.728	1.3364 Eks	7.993.728
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Dinas PMD	Tamu Dinas PMD	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu	1.692 Porsi	16.157.354	1.716 Porsi	17.188.643
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Deli Serdang, Provinsi dan Nasional	ASN Dinas PMD	Jumlah kunjungan rapat rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	559.725.680	1 Tahun	516.834.880
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1	Pengadaan Mebel	Kantor Dinas PMD	-	Jumlah pengadaan mebel	26 Unit/Buah	77.083.552	46 Unit/Buah	144.951.552

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Indikator (Output/Outcome)	Target dan Pagu Anggaran Tahun 2021			
					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
					Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas PMD	-	Jumlah gedung/kantor/bangunan yang dibangun	3 Unit	182.760.000	3 Unit	193.980.000
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas PMD	-	Jumlah perlengkapan gedung/kantor	4 Unit	30.840.000	4 Unit	41.120.000
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Penyediaan Jasa Surat Manjurat	Kantor Dinas PMD	-	Jumlah Materai	120 Buah	771.000	120 Buah	771.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas PMD	-	Jumlah jasa telepon/internet dan air	12 Bulan	21.009.812	12 Bulan	25.982.823
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Dinas PMD	-	Jumlah pelayanan umum kantor	12 Bulan	424.238.691	12 Bulan	428.876.499
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Dinas PMD	Mobil Dinas Operasional ASN Dinas PMD	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	7 Unit	251.860.000	7 Unit	251.860.000
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Dinas PMD	-	Jumlah sarpras dan bangunan yang terpelihara	1 Unit	112.860.000	1 Unit	129.960.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas PMD	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	18 Unit	10.980.000	18 Unit	10.980.000
4 Program, 10 Kegiatan, 33 Sub Kegiatan				Total Pagu Anggaran	16.310.296.285	18.481.382.943		



BAB IV

P E N U T U P

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa tugas pemberdayaan masyarakat merupakan tugas yang sangat penting dilaksanakan, karena keberhasilan meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat khususnya di perdesaan merupakan cermin keberhasilan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.

Tugas pemberdayaan masyarakat tentu saja banyak rintangan dan hambatan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut dari Program/Kegiatan sebagaimana telah diuraikan diatas dapat direalisasikan pendanaannya.

Dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak sangat membantu tercapainya sasaran program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Demikianlah rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 ini disusun dengan harapan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021.

Lubuk Pakam, April 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG**

**Drs. H. CITRA EFFENDI CAPAH, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710626 199101 1 002**